

Analisis Profesionalisme Kerja terhadap Tatakelola Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan

¹Nurul Rafiqoh Lubis, ²Muhammad Arif

^{1,2}Ekonomi Islam-UIN Sumatera Utara

nurulborlub27@gmail.com, mhdarif1895@gmail.com

ABSTRACK

Professional arrangement of apparatus resources must be prioritized, because reforms in the field of government administration expect the presence of a government that is more qualified and capable of carrying out public service functions. The focus and hope is directed at the government apparatus, because the government apparatus is the provider of services for the community as well as the person in charge of the function of public services in Indonesia which directs its goals to public service, thinks about and seeks to achieve service goals for the entire community in various layers. This research was conducted as one of the outputs of the Field Practice Program (internship) which was carried out for one month at the Medan City Regional Secretariat Office. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is primary data, which collects data by observing customers and directly interviewing employees of the Medan City Regional Secretariat. The results of this study are that even though they consist of different educational backgrounds, and in work positions that are not in accordance with their educational background, the work is still carried out properly according to their duties and functions and follows the basic accounting equation system as the basis for managing finances at the Secretariat. Medan City area.

ABSTRAK

Penataan sumber daya aparatur yang profesional harus diprioritaskan, karena reformasi di bidang administrasi pemerintahan mengharapkan hadirnya pemerintah yang lebih berkualitas dan mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik. Tumpuan dan harapan tersebut tertuju kepada aparatur pemerintah, karena aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat sekaligus sebagai penanggung jawab fungsi pelayanan umum di Indonesia yang mengarahkan tujuannya kepada *public service*, memikirkan dan mengupayakan tercapainya sasaran pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam berbagai lapisan. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu bentuk output Program Praktek Lapangan (magang) yang dilaksanakan selama satu bulan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan observasi nasabah dan mewawancarai langsung pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun terdiri dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dan ditempat posisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya tetapi pekerjaan tetap dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengikuti sistem persamaan dasar akuntansi sebagai dsar dalam mengelola tata keuangan di Sekretariat Daerah Kota Medan.

Kata Kunci : Profesionalisme Kerja, Tata Kelola Keuangan, Sekretariat Daerah Kota Medan

PENDUHLUAN

Di era otonomi daerah seperti yang sekarang ini pemerintahan daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan birokrasi. Untuk mewujudkan semua itu, maka perlu disikapi oleh pelaksana pemerintah untuk dapat menciptakan pemerintah yang baik dan berwibawa yang efisien, efektif dan produktif dalam melaksanakan roda pemerintah dan pembangunan. Pembangunan aparatur pemerintah ini yang diarahkan pada makin terwujudnya administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan ketetapan tugas. Dalam era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan besar yang di hadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisiensi. Kompetensi Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi sesuai porsi dan objeknya. Namun dalam kenyataan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari aparatur Negara khususnya PNS belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Masalah lainnya yang ditemukan pada Setda Kota Medan adalah pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sementara itu pendidikan seseorang dapat dianggap sebagai penunjang kualitas dan kapasitas pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ditemukan pula masih banyaknya pegawai yang sering menunda pekerjaan dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Beberapa masalah tersebut diidentifikasi sebagai faktor yang menunjukkan bahwa pengembangan pegawai pada Setda Kota Medan belum optimal, sehingga mempengaruhi produktifitas kerja pegawai. Pada kenyataannya profesionalisme seorang birokrat dalam aparatur Negara pada saat ini belum bisa dikatakan baik, karena pada saat ini pemerintah banyak mendapatkan sorotan publik terutama dalam hal pelayanan yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka.

Penataan sumber daya aparatur yang profesional harus diprioritaskan, karena reformasi di bidang administrasi pemerintahan mengharapakan hadirnya pemerintah yang lebih berkualitas dan mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik. Tumpuan dan harapan tersebut tertuju kepada aparatur pemerintah, karena aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat sekaligus sebagai penanggung jawab fungsi pelayanan umum di Indonesia yang mengarahkan tujuannya kepada *public service*, memikirkan dan mengupayakan tercapainya sasaran pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam berbagai lapisan. Hal ini mengharuskan pihak pemerintah senantiasa mengadakan pembenahan menyangkut mutu dan kualitas dari pelayanan yang dihasilkan. Menurut (Hamid, dalam <http://ardikurniawan2005.wordpress.co m>) Dalam dapat menciptakan pelayanan yang baik, diperlukan aparatur yang profesional dalam mengemban tugasnya, hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Istilah profesional dapat diartikan berupa pandangan untuk selalu berfikir, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi demi untuk keberhasilan pekerjaannya. Sehingga aparatur yang profesional dapat di lihatdari adanya sikap perjuangan, pengabdian, bekerja sepenuh waktu, kemampuan, dan disiplin guna memiliki prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan menjadi lebih berdayaguna dan berhasil guna. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, yaitu dengan memberikan peningkatan kualitas kerja yang baik kepada masyarakat.

Tugas pokok aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Profesionalisme kerja adalah hal dasar dalam meningkatkan pelayanan publik, maka setiap aparatur pemerintah dituntut untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya. Namun kenyataannya berdasarkan pengamatan penulis pada penelitian di Sekretariat Daerah Kota Medan terlihat bahwa profesionalisme kerja pegawai belum sesuai dengan

kondisi yang diharapkan, yaitu profesionalisme kerja yang dapat mendukung terciptanya peningkatan kualitas pelayanan yang baik. Dari berbagai bidang pekerjaan yang digeluti oleh aparatur pemerintah jelas sekali yang menjadi permasalahan adalah menyangkut ketidakprofesionalan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penting yang dipercayakan kepadanya sehingga mengakibatkan banyak kerugian di pihak masyarakat yang sangat menginginkan hasil kerja yang maksimal dalam memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu, dengan melihat permasalahan yang telah dijabarkan penulis diatas maka penulis mengangkat judul *Analisis Profesionalisme Kerja Terhadap Tatakelola Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan kondisi serta fenomena yang terdapat di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan observasi nasabah dan mewawancarai langsung pegawai Sekretariat Daerah Kota Medan. Peneliti melakukan penelitian selama satu bulan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Profesionalisme Kerja

Menurut Siagian, (2009: h.63) profesionalisme adalah, "Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan." Selanjutnya Sedarmayanti, (2004: h.57) mengungkapkan bahwa "Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan." Profesionalisme aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik menurut Kurniawan, (2005: h.79) digambarkan sebagai, "Bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah *resposivitas*,"

Kemudian, terdapat beberapa indikator dalam penilaian mengenai profesionalisme, yaitu sebagai berikut :

Menurut Martin Jr, (dalam Thoha, 2001: h.75) karakteristik profesionalisme aparatur yang menjadi indikator profesionalisme kerja pegawai, mencakup :

- a. Kemahiran dalam mempergunakan peralatan.
Kemahiran merupakan salah satu unsur kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan serta pengalaman. Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan atau kemahiran pegawai yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Istilah tersebut mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas dan bagiannya.
- b. Kesiapan
Kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan publik. Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
- c. Tanggung Jawab Dalam Pelayanan
Tuntutan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan publik menjadi penting bagi berlangsungnya sistem pemerintahan yang baik berdasarkan kepercayaan. Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi publik secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

d. Disiplin

Secara teoritis loyalitas berhubungan dengan tingkat kedisiplinan, terutama dalam hal ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Kedisiplinan akan terwujud dengan baik jika pegawai mampu menaati peraturan-peraturan yang ada.

e. Sikap pegawai

Setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan, sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan tertentu. Sikap sopan santun, respek, perhatian, keramahan serta dalam komunikasi dengan baik dalam arti memberikan informasi kepada publik dalam bahasa yang mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan publik.

Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, artinya keahlian yang dimiliki dan kemampuan karyawan merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Ranupandojo (2013:73), menyatakan bahwa "Profesional adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*). Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi urgen baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

B. Tata Kelola Keuangan

Tata kelola merupakan mekanisme pengelolaan sumberdaya, ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor pemerintah dan sektion non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Sarana keuangan negara merupakan instrumen yang sangat vital untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara. Sedemikian pentingnya arti sarana keuangan negara menyebabkan penyelenggara negara perlu mengaturnya sejak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aspek konstitusionalitas hingga dalam berbagai aturan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun peraturan kebijaksanaan (*policy rule*). Hal ini bermakna pengaturan keuangan negara memerlukan desain hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstitusional sekaligus merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan administratif dan perbendaharaan. Proses pengelolaan keuangan merupakan suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan berkeluarga. Seharusnya para pengelola keuangan keluarga mampu mengelola dana yang dimiliki dengan cara menyisihkannya untuk menabung dan berinventasi. Salah satu faktor yang menyebabkan fenomena itu adalah pengetahuan keuangan atau disebut juga literasi keuangan. Pernyataan tersebut didukung oleh bukti empiris dari penelitian (Lutfi dan Rr Iramani, 2008) bahwa pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang masih kurang menjadi alasan utama mengapa masyarakat gagal mengelola uang pribadinya. Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas klasik tersebut meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas. Asas-asas baru yang diterapkan sebagai cerminan dari *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara meliputi asas-asas: akuntabilitas

berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Fungsi dari diterapkannya asas-asas tersebut adalah untuk mendukung terwujudnya *good governance*, menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah dan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah. Dan menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara.

C. Sekretariat Daerah Kota Medan

Adapun tugas tugas sekretariat daerah (sekda) yang utama adalah sebagai koordinator seluruh satuan perangkat kerja pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan kepala daerah agar desentralisasi dan tugas pembantuan dapat dipenuhi. Untuk fungsi sekda adalah penyusunan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pengelolaan keuangan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas instansi pemerintah daerah, penyusunan program kerja, hingga distribusi tugas. Terkait dengan tugasnya, sekda memiliki beberapa wewenang untuk perizinan seperti surat izin proyek pembangunan dan lainnya.

D. Analisis

Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada Program Praktek Lapangan (magang) di Kantor Sekretariat Daerah Kota Medan, tingkat profesionalisme kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kota Medan sudah berjalan cukup baik. Meskipun banyak pegawai yang erasal dari latar belakang pendidikannya yang bermacam-macam dan juga ditempatkan pada posisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya tetapi mereka tetap menjalankan pekerjaannya dengan belajar didunia kerja. Misalnya, pegawai yang lulusan S.KOM kemudian mengambil alih pekerjaan akuntansi, sebelumnya pegawai tersebut sudah belajar terlebih dahulu bagaimana melaksanakan sistem persamaan dasar akuntansi. Dan ada juga pegawai yang memang lulusan Diploma Akuntansi dari Politeknik Negeri Medan yang menjadi dasar mereka untuk belajar serta sistem dasar akuntansi yang telah diterapkan perusahaan jugalah yang menjadi acuan mereka dalam bekerja. Para pegawai sudah melaksanakan sedemikian rupa aturan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesinya masing-masing. Hal ini tidak hanya dilihat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, tetapi seluruh pegawai baik PNS maupun honorer tetap melaksanakan pekerjaannya dengan profesional. Dan, di dalam tata kelola keuangannya selain keahlian dalam profesionalismenya para pegawaipun menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yaitu membuat bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia, seperti :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi atau kejadian, dan jumlah rupiah.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) mencatat bukti memorial kedalam buku jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting kedalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan.
3. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Ardianingsih, A. I. (2019). Analisis Profesionalisme Dan Etika Profesi Dalam Penentuan Pertimbangan Tingkat Materialitas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, XXI.
- Carolus Askikarno Palalangan, N. P. (2019). Tata Kelola Keuangan pada Objek Wisata Ke'te Kesu di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Buana Akuntansi*, IV.
- Hanantyo Sri Nugroho, A. R. (2022). Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Purwomartani Dan Selomartani Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Jisipol*, VII.
- Hasibuan, A. R. (2021). Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Akhir Periode Tahun 2020. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, IV.
- I, N. U. (2014). Analisis Profesionalisme Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Pt. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Nagan Raya.
- Lintang, V. A. (2021). Analisis Tata Kelola Keuangan Negaradi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, IV.
- Muhammad Ikbal, H. S. (2019). Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat Terhadap Kualitas Kerja Di Kantor Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*, V.
- Rangga Saputra, N. (2020). Analisis Profesionalisme Kerja Pegawai Pada Kantor Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, VI.
- Rizki, A. (2019). Analisis Profesionalisme dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara.
- Wahyu Ramadhan, E. K. (2019). Pengaruh Profesionalisme, Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta dan Yogyakarta). *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Warka Syachbrani, M. Y. (2018). Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan). *Bongaya Journal of Research in Management*, I.
- Yunus, I. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Dan Kecurangan Terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dengan Intervening Pengendalian Intern. *Jurnal Akrab Juara*, III.